

PENDIDIKAN ISLAM dan PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI

Oleh Juni Erpida Nasution

Abstract : Upaya pembaruan pendidikan Islam tidak lagi bersifat konsumtif dalam pengertian pemuasan secara langsung atas kebutuhan dan keinginan yang bersifat sementara atau “tambal sulam” konsep saja, tetapi harus merupakan bentuk investasi “sumber daya manusia (human investment)” yang berkualitas, dengan tujuan utama: (1) pendidikan Islam harus dapat membantu meningkatkan kualitas iman yang aplikatif, pengetahuan, dan keterampilan untuk dapat bekerja lebih produktif; (2) pendidikan Islam sebagai proses pembebasan dan proses pencerdasan manusia; (3) pendidikan Islam sebagai proses untuk menjunjung tinggi hak-hak anak, mengembangkan pemahaman tentang toleransi, perbedaan etno-kultural, perbedaan dan keragaman agama, pluralitas; (4) pendidikan Islam sebagai proses pemberdayaan potensi manusia; (5) pendidikan Islam dapat menjadikan anak berwawasan integratif; (6) pendidikan Islam dapat menghasilkan manusia demokratis dan membangun watak persatuan; dan (7) pendidikan Islam dapat menghasilkan manusia cinta perdamaian dan peduli terhadap lingkungan..

Kata Kunci: Pendidikan, masyarakat, pembentukan karakter

PENDIDIKAN ISLAM dan PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI

Oleh Juni Erpida Nasution

Pendahuluan

Kajian terhadap masyarakat madani muncul dalam beberapa perspektif, diantaranya membangun masyarakat sipil: prasyarat menuju kebebasan. Gellner, mengatakan bahwa masyarakat madani akan terwujud manakala terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, bebas dari eksploitasi dan penindasan.¹ Hefner menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen.² Dari pandangan Gellner dan Hefner tersebut, dapat dikatakan bahwa karakteristik masyarakat madani adalah bentuk masyarakat ideal, relegius dan spiritual, intelektual, moral, hukum, berperadaban, demokrat, moderat, mandiri (independen), bertanggung jawab (*responsible*), profesional, dan reformis.

Menurut Muhammad Naquib al-Attas, konsep masyarakat madani merupakan terjemahan dari bahasa Arab *'mujtama' madani*. Secara etimologi mempunyai dua pengertian: (1) "masyarakat kota, madani adalah derivat dari kata bahasa Arab, *madīnah* yang berarti kota; (2) masyarakat yang berperadaban, karena madani adalah juga merupakan

¹E. Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan*, terj. Hasan (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 2.

²R.W. Hefner, "Civil Society: Cultural Possibility of a Modern Ideal", *Society*, Vol. 35, No. 3, March/April, 1998, hlm. 16-20.

derivat dari kata Arab *tamaddun* atau *madaniah* yang berarti peradaban.³ Dalam kamus *al-Munawir*, istilah masyarakat madani dikatakan berasal dari bahasa Arab, *madanīy*, berakar dari kata kerja *madana* yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Istilah tersebut berubah menjadi *madanīy* yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata.⁴ Pandangan Nurcholish Madjid mengacu pada konsep “negara kota Madinah” yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M. Nurcholish Madjid senada dengan al-Attas, yang menyatakan bahwa masyarakat madani mengacu pada konsep *tamaddun* atau masyarakat berperadaban yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun dan konsep *al-Madīnah al-fadhīlah* atau Madinah sebagai Negara Utama yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan,⁵ dan perkataan *madīnah* sendiri yang berarti kota.

Masyarakat madani sebagai suatu era baru yang sangat terkait dengan hal ihwal kehidupan bangsa, budaya, dan tata nilai sebagai acuan sikap perilaku manusia Indonesia. Kondisi ini, memerlukan pola interaksi baru yang memungkinkan seseorang belajar menerima keragaman, perbedaan, dan universalitas. Pola interaksi baru tersebut dapat dikondisikan melalui pendidikan (pembinaan) bernalar melalui ekspresi-ekspresi yang asasi sehingga tercipta landasan pola yang logik, etik, estetis, dan pragmatis.⁶ Pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung dan bahkan mempercepat pembentukan masyarakat madani demokratis berkeadaban (*democratic civility*) sebagai salah satu karakteristik dari masyarakat tersebut. Sjafrī Sairin, mengatakan bahwa sosialisasi nilai-nilai untuk mendukung pembentukan masyarakat madani perlu menjadi

³M. Dawam Raharjo, “Masyarakat Madani di Indonesia: Sebuah Peninjauan Awal”, *Jurnal Pemikiran Islam Pramadina* (Jakarta: Vol. I, Nomor 2, 1999, ISSN: 1410-8410), hlm. 8.

⁴A.W. Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1320.

⁵Hidayat Syarief, “Paradigma Baru Pendidikan Membangun Masyarakat Madani”, *Republika*, 30 Oktober 1999.

⁶Arif Budi Wuriyanto, “Ke Arah Pembinaan Masyarakat Madani (Tinjauan Kebudayaan)”, dalam Taufik Abdullah, *Membangun Masyarakat Madani*, hlm. 119.

bagian penting dari sistem pendidikan nasional,⁷ termasuk pendidikan Islam.

Untuk menuju “pembentukan masyarakat madani”, diperlukan penataan pemikiran pendidikan berbasis pada “paradigma pendidikan madani”. konsep pendidikan diorientasikan untuk mampu menghasilkan manusia Indonesia yang: berpengetahuan luas; berketerampilan dan kecakapan; berakhlaqul karimah; berkemampuan spiritual dan moral yang tinggi; taat hukum; demokratis; berperadaban; moderat; mandiri; bertanggung jawab; profesional; dan reformis. Perubahan dengan mendesain ulang konsep filosofi yang jelas dan baku, visi, misi, tujuan, kurikulum dan materi, proses pendidikan, pengelolaan dan fungsi lembaga.

Basis Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani

Basis pendidikan Islam menuju terbentuknya masyarakat madani sangat membutuhkan individu dan masyarakat dengan kemampuan yang tinggi, unggul, berkualitas, dan profesional. Pendidikan itu sendiri adalah proses memanusiakan manusia, yang akan mencapai kecakapan fundamental secara emosional, intelektual, dan selalu berpikir ke depan. Terkait dengan sudut pandang tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah **teori progresivisme**, hendak melihat ke depan daripada ke belakang. Teori progresivisme melihat manusia selalu berperan dalam upaya menciptakan kemajuan. Menurut Barnadib, hendaknya kemajuan budaya ilmu dan teknologi tetap membantu peningkatan religiositas, misalnya dengan pengembangan atau peningkatan produksi perangkat lunak (*softwares*).⁸

Penyusunan paradigma baru menuntut proses terobosan pemikiran (*breakthrough thinking process*).⁹ Pemikiran perubahan pendidikan menuju masyarakat madani sangat membutuhkan individu dan masyarakat dengan kemampuan yang tinggi, unggul, berkualitas, dan profesional.

⁷Sjafri Sairin, “Masyarakat Madani dan Tantangan Budaya”, hlm. 99.

⁸Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan*, hlm. 27.

⁹H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Tera Indonesia, 1998), hlm. 245.

Untuk menjadi pelaku aktif dalam bidang tertentu, kualitas kegiatan tertentu, kualitas hasil yang dikehendaki. Dalam kehidupan masyarakat madani, sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam bidangnya, sumber daya manusia yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap tata nilai dan sistem dalam masyarakat tersebut. Peran pendidikan sangat diharapkan untuk dapat “mempersiapkan individu dan masyarakat yang memiliki kemampuan, motivasi, dan berpartisipasi secara aktif dalam aktualisasi dan institusionalisasi masyarakat madani” tersebut.¹⁰ Artinya, pendidikan dibutuhkan dan diharapkan untuk mempersiapkan manusia Indonesia memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kemampuan tertentu, agar dapat aktif dalam masyarakat madani Indonesia yang dicita-citakan tersebut.

Kaitan dengan upaya perubahan dan pemberdayaan menuju masyarakat madani, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan, yaitu:

1. Pendidikan *civics* menjadi sangat penting dengan mempertimbangkan karakteristik bangsa Indonesia. Pendidikan *civics* tersebut harus mencakup pendidikan yang mampu menumbuhkan perspektif historis dan kesadaran nilai yang diyakini yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat madani Indonesia;
2. Pembentukan kepribadian yang unggul perlu dikembangkan juga kemampuan inteligensi yang berdimensi banyak (*multiple intelligence*), termasuk di dalamnya adalah intelegensi emosional, moral, dan sipiritual;
3. Sangat perlu untuk melakukan pengembangan pendidikan massal (*mass education*). Artinya, diperlukan berbagai pendekatan dengan pemberdayaan dan pendayagunaan media komunikasi massa

¹⁰Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan Filosofi, “Kebijakan dan Strategi Pendidikan Nasional, Bab II: Masyarakat Madani Indonesia”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 15 Februari 1999, hlm. 11.

tradisional, cetak, dan elektronik,¹¹ seperti TV, internet, web, *homepage*, *CD-room* dan lain-lain;

4. Model pembelajaran yang dikembangkan akan diarahkan pada pencapaian kompetensi-kompetensi, sebagai berikut: (a) mengembangkan kompetensi akademik standar dan dasar, tentang nilai persatuan, kesatuan, demokrasi, kebebasan, persamaan derajat, atau saling menghargai dalam keragaman budaya; (b) mengembangkan kompetensi sosial agar dapat menumbuhkan pemahaman tentang latar belakang budaya sendiri dan budaya lain dalam masyarakat; dan (c) mengembangkan kompetensi akademik untuk memiliki kemampuan agar dapat menganalisis isu-isu dan masalah keseharian (*real-life problems*) melalui proses dialog;
5. Pendidikan yang dipersiapkan dan dikembangkan untuk masyarakat madani adalah pendidikan yang dapat mengembangkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri (otonomi), serta mempunyai rasa tanggung jawab (*responsibility*) terhadap kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pembaruan pendidikan Islam menuju masyarakat madani mensyaratkan perubahan kurikulum dan proses pendidikan Islam, sehingga diharapkan dapat mengembangkan sikap demokratis, sikap toleransi, sikap taat hukum, sikap egalitarian, sikap menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai kemajemukan budaya, mengembangkan wawasan global, sikap saling pengertian, membangun manusia dan masyarakat berwawasan global,¹² membangun sikap anti kekerasan dalam pendidikan, dan membangun sikap anti-korupsi dalam pendidikan. Digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

¹¹Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan Filosofi, "Kebijakan dan Strategi Pendidikan Nasional", hlm, 12.

¹²H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, hlm. 179-181.

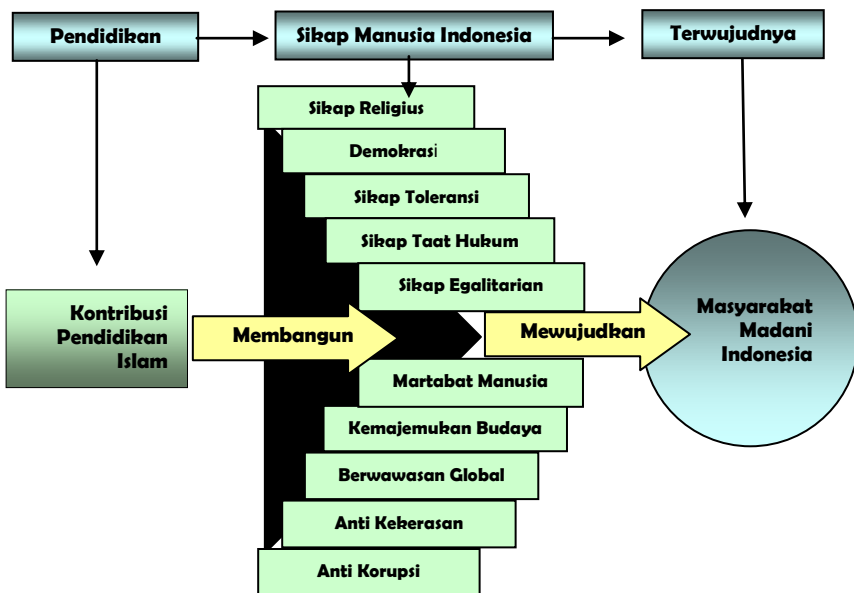


Diagram Kontribusi Pemikiran Pendidikan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia

Pendidikan Madani Berbasis Religius

Pendidikan dapat membangun dan mewujudkan masyarakat yang memiliki sikap religius yang tinggi. Masyarakat madani yang diinginkan bukan masyarakat sekuler-materialistik, tetapi etis-religius atau agamis. Sebab agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran yang tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat. Menurut Nurcholish Madjid, relevan dalam kehidupan masyarakat adalah bagaimana agama dipahami dan dihayati dalam kehidupan nyata, dengan berbagai dampaknya yang mungkin saja tidak seluruhnya positif bagi kehidupan manusia.¹³

¹³Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 1997), dalam Ernie Isis Aisyah Amini, "Analisis Kebutuhan Pendidikan Multikultural Berbasis Kompetensi Pada Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kota Mataram", Tesis Jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Program Pascasarjana IKIP Negeri Singaraja, 2004, hlm. 50.

Pendidikan madani yang diharapkan adalah pendidikan yang dapat membangun bagaimana agama dipahami dan dihayati dalam kehidupan nyata, membangun sikap manusia takwa, sikap mencerminkan ketaatan, ketundukan, dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Indikatornya adalah: (a) lahir sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap keimanan dan keyakinan dan individu terhadap Tuhan YME; (b) sikap ketaatan, yaitu sikap dan perilaku mencerminkan ketundukan, kepatuhan dalam menjalankan perintah, menghindari dan menjauhi larangan agama; (c) bagaimana agama dipahami, dan dihayati dalam kehidupan nyata, bukan dalam alam idea, tetapi alam nyata, dengan berbagai dampaknya bagi kehidupan manusia.

Persoalan yang dihadapi dunia pendidikan sekarang ini di Indonesia adalah “nilai keagamaan” hanya sebatas menjadi pengetahuan (kognitif), belum menjadi perilaku (psikomotor), belum menjadi moral *action*. Konsep pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran moral *action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*) dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Lickona (1991), untuk mendidik moral anak sampai pada tataran *moral action*, diperlukan tiga proses pembinaan berkelanjutan, yaitu mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*.¹⁴

¹⁴Thomas Lickona, *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1991), hlm. 53. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Potensi peserta didik dapat dikembangkan secara optimal, baik aspek: (a) *kecerdasan intelektual*, yaitu memiliki kecerdasan, pintar, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat; (b) *kecerdasan emosional*, yaitu memiliki kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain; (c) *kecerdasan sosial*, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerja sama, dan senang berbuat untuk menyenangkan orang lain; (d) *kecerdasan spritual*, yaitu memiliki iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah, gemar berbuat baik karena Allah, disiplin beribadah, sabar, ikhtiar, jujur, serta pandai bersyukur dan berterima kasih; maupun aspek (e) *kecerdasan kinestetik*, yaitu memiliki kemampuan menciptakan kepedulian terhadap dirinya, menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizeki yang halal, dan sebagainya.¹⁴ Dari kerangka pemikiran ini, maka proses pendidikan di sekolah harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan,

Pendidikan Madani Berbasis Demokrasi

Pendidikan berbasis pada “pembebasan” manusia, paradigma pendidikan madani diharapkan dapat mewujudkan dan mengembangkan sikap demokrasi sebagai ciri utama yang memiliki konsekuensi luas, di antaranya menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik dengan organisasi mandiri, sehingga memungkinkan pengawasan aktif dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan pembangunan. Peran pendidikan dapat membentuk sikap demokratis, terbuka terhadap keragaman, menghargai aspirasi antarsesama manusia, menjunjung tinggi nilai kebenaran dalam mewujudkan masyarakat plural yang damai dan bermartabat.

Pendidikan madani dapat mengembangkan sikap demokratis,¹⁵ pembentukan individu yang mempunyai harga diri, berbudaya, memiliki identitas sebagai muslim dan bangsa Indonesia. Menumbuhkan sikap demokratis dalam bentuk perilaku sebagai *culture* dan dalam sistem yang dapat mengembangkan sikap tersebut. Lembaga pendidikan Islam sudah harus mendesain kurikulum dan proses belajar yang menumbuhkan sikap kreatif, bebas, dan sanggup mengemukakan pendapat, berbeda pendapat, dan menghargai pendapat. Desain kurikulum harus bersifat dinamis yang

mulai dari proses moral *knowing*, *moral feeling*, hingga pada moral *action*. Sebab, pendidikan itu sendiri sebagai sarana dan memiliki peran strategis dalam mendukung, bahkan mempercepat pembentukan karakter manusia dan masyarakat berkeadaban, (Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. xix), relegius, demokratis, dengan memiliki kemampuan, keterampilan, etos, dan motivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

¹⁵Menurut Azyumardi Azra, pendidikan demokrasi dalam segi-segi tertentu identik dengan pendidikan kewargaan (*civic education*) tetapi terlihat bahwa pendidikan kewargaan lebih luas cakupannya daripada sekadar pendidikan demokrasi. Hal ini juga tercermin jelas dalam rumusan *civitas* internasional, bahwa pendidikan kewargaan yang efektif mencakup empat hal, yaitu: (a) pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan kelembagaannya; (b) pemahaman tentang *rule of law* dan HAM seperti tercermin dalam rumusan-rumusan perjanjian-perjanjian dan kesepakatan internasional dan lokal; (c) penguatan keterampilan partisipasi yang akan memberdayakan peserta didik untuk merespons dan memecahkan masalah-masalah masyarakat mereka secara demokratis; (d) pengembangan budaya demokrasi dan perdamaian pada lembaga-lembaga pendidikan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat. *Ibid.*, hlm. 157.

dapat mendorong peserta didik untuk membuka diri mengembangkan minat, bakat, keterampilan, memahami tentang hak dan kewajiban, bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, bangsa, dan aktif memajukan masyarakat. Kurikulum pendidikan Islam pun didesain bersifat dinamis dan mampu memberikan ruang bagi terwujudnya kreativitas peserta didik, memiliki kemampuan dan semangat untuk melakukan perubahan sosial. Desain pembelajaran dapat memberikan penguatan keterampilan partisipatif yang akan memberdayakan peserta didik untuk merespons dan memecahkan masalah secara demokratis.

Para guru dan dosen yang selama ini bersikap *otokratis, killer*, sudah harus meninggalkan sikap tersebut, karena hal tersebut tidak memungkinkan tumbuhnya sikap demokratis dari para peserta didik. Harus terjadi perubahan paradigma secara radikal, dari paradigma otoriter ke paradigma demokratis, paradigma tertutup ke paradigma terbuka, paradigma doktriner ke paradigma partisipatoris. Peserta didik tidak dipandang sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembelajaran; pendidik sebagai fasilitator, dinamisator, mediator, dan motivator; orientasi pembelajaran difokuskan pada *problem solving*, bagaimana peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya; orientasi manajemen pendidikan dari sentralistik ke manajemen desentralistik. Dengan demokratisasi pendidikan, akan terjadi proses kesetaraan antara pendidik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan akan menghasilkan lulusan yang merdeka, berpikir kritis, toleran dengan pandangan orang lain, mampu mengembangkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Pengembangan pendidikan Islam berbasis demokrasi mengandung kebebasan intelektual, kesempatan bersaing, mengembangkan kepatuhan spiritual dan moral, pendidikan yang mengakui hak untuk berbeda dan percaya pada kemampuan manusia. Maka, dapat dikatakan bahwa pendidikan madani berbasis demokratis yang dapat dikembangkan adalah: (a) proses pendidikan yang mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik; (b) menghargai perbedaan pendapat (*the right to be different*); (c) kebebasan untuk mengaktualisasikan diri; (d) kebebasan intelektual; (e) kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri-sendiri (*self realization*); (f) pendidikan yang membangun moral,

pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.¹⁶ Untuk itu, lembaga pendidikan Islam perlu melakukan sinkronisasi dengan lingkungan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan berorientasi “pembebasan”; pengembangan budaya demokrasi ke seluruh aspek kehidupan masyarakat; membudayakan tradisi berpikir kritis, kemampuan dialog, keterbukaan, semangat pluralisme, serta praktik yang menyentuh masalah umat, baik bersifat politik, sosial, maupun budaya, dan mengembangkan konsep pendidikan Islam yang menghargai potensi manusia yang beradab sesuai dengan cita-cita masyarakat madani.

Pendidikan Madani Membangun Sikap Toleransi

Toleran diartikan sebagai dua kelompok yang berbeda kebudayaan saling berhubungan dengan penuh, bertoleransi, bersikap toleran: sifat fanatik dan tidak, sedangkan menoleransi adalah mendiamkan, membiarkan.¹⁷ Bila demikian, maka “toleransi” lebih diartikan dengan sikap “tenggang rasa”, menghargai, dan membolehkan orang lain memiliki sesuatu yang berbeda, baik pada aspek agama, keyakinan, budaya, etnis-suku, pendapat, pendirian, dan sebagainya yang berbeda dengan dirinya. Sikap ini dalam konteks pendidikan madani harus terbangun dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

Dalam konteks paradigma pendidikan madani, diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang memiliki sikap toleransi, yaitu; *pertama*, terbangun sikap menghargai dan membolehkan orang untuk berbeda kepercayaan, keyakinan, dan agama; *kedua*, terbangun sikap menghargai orang lain untuk berpendirian dan berbeda pendapat. Indikator yang dapat diukur, adalah: (a) tenggang rasa untuk menghormati pilihan dan cara bereksperesi terhadap orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; (b) terbangun sikap kesadaran dalam

¹⁶Diding Nurdin, “Reformasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani”, dalam http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?_mib=beritadetail&id=34248, diakses pada Jumat, 6/2/2009, jam 24.00 WIB.

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dalam jaringan, dalam <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada Sabtu, 26/9/2009, jam. 18.00 wib.

memahami, mengakui, dan menghormati adanya keragaman agama, keyakinan yang diyakini orang lain, dan sebagainya.

Sikap toleransi dapat diwujudkan oleh semua anggota dan semua lapisan masyarakat, sehingga terbentuk masyarakat yang *rahmātan lil ‘ālaīmin*, yaitu masyarakat yang damai, aman, kompak tapi beragam dan kaya dengan ide-ide. Menurut Juwono Sudarsono,¹⁸ di samping sikap toleransi, juga penting sikap kompromi perlu dikembangkan dalam proses pendidikan. Didukung pula dengan “sikap saling pengertian” yang perlu dikembangkan dalam proses pendidikan, sehingga perbedaan pendapat dan pandangan justru menjadi “*rahmah*” dan “*hikmah*” untuk membentuk masyarakat yang memiliki wawasan dan horizon yang luas, kaya dengan perbedaan, dan wawasan sosial kemasyarakatan yang memadai. Untuk itu, dalam proses pendidikan Islam diharapkan dapat mengakomodasi sikap tersebut, sehingga terbentuk budaya sikap toleran, saling menghargai, tenggang rasa, membolehkan orang lain memiliki sesuatu yang berbeda, pandangan yang berbeda, agama, keyakinan, dan sebagainya dengan dirinya, sebagai manifestasi dari nilai ajaran Islam (nilai Ilahiah) yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud *insāniyyah* dan *alāmiyyah* yang *rahmatan lil ‘ālaīmin*.

Pendidikan Madani Berbasis Hukum

Dalam konteks masyarakat madani sangat dibutuhkan pemahaman tentang *rule of law* dan hak asasi manusia. Hukum diartikan dengan “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; atau patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dsb.) yang tertentu.”¹⁹ Jadi, sikap taat hukum adalah konsekuensi seseorang sebagai warga masyarakat untuk menaati dan menjalankan peraturan, adat, undang-undang, patokan (kaidah dan ketentuan) tertentu yang dikukuhkan oleh

¹⁸Juwono Sudarsono, ICWA, diskusi mengenai “The Development of Education and Civil Society”, (akarta: 9 Maret 1999).

¹⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dalam jaringan, dalam <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada Sabtu, 31/10/2009, jam 19.00 WIB.

pemerintah dan secara resmi dianggap telah mengikat dan mengatur semua warga dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari pengertian tersebut, kiranya pendidikan madani diharapkan dapat mewujudkan sikap dan perilaku menghormati dan taat pada hukum dalam proses pembelajaran. Untuk mewujudkan sikap taat hukum dalam proses pembelajaran, langkah yang dilakukan adalah peserta didik dikenalkan dengan berbagai peraturan, adat-istiadat, undang-undang, kaidah, ketentuan, agar dapat dipahami sebagai pengetahuan (*knowledge*), sebagai sikap (kognitif), dan dapat diaplikasikan (psikomotorik) dalam kehidupan. Disebut oleh Lickona, sebagai *moral knowing*, *moral feeling*, hingga menjadi *moral action*.

Dalam konteks ini diperlukan kepastian hukum atau masyarakat yang diwarnai oleh *rule of law* dan bukan kekuasaan yang sangat dominan, tetapi hukumlah yang perlu ditegakkan sebagai panglima. Keadilan harus dibangun sebagai alat kontrol dalam menjalankan hukum tanpa pandang bulu. Perlu membangun sikap dalam menegakan hukum, tidak ada seorang pun kebal terhadap hukum. Prinsip konsistensi legal (hukum) harus ditegakkan tanpa pandang bulu, supremasi dan kepastian hukum benar-benar dapat dirasakan semua anggota masyarakat. Hukum untuk pendidikan agar menjadikan manusia menjadi baik. Ciri utama dari masyarakat madani adalah masyarakat demokrasi dan taat hukum, memiliki konsekuensi luas, di antaranya menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistem politik, dengan organisasi lembaga swadaya masyarakat yang mandiri, memiliki memungkinkan kontrol dan pengawasan aktif (*quality control*) dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan pembangunan. Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat madani, bukan kekuasaan yang sangat dominan, hukumlah yang perlu ditegakkan, hukumlah yang menjadi panglima, karena hukum dapat bermakna apabila masyarakat menuntut haknya. Dalam konteks ini, sikap egalitarian perlu dibangun, agar masyarakat dapat memperjuangkan keadilan, memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok elite, untuk maju dan berkembang.

Pendidikan Madani Membangun Sikap Egalitarian

Kata egaliter, bermakna kesetaraan. Egalitarian adalah paham yang mempercayai semua orang sederajat. Sementara, egalitarianisme diartikan sebagai doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia-manusia itu ditakdirkan sama, sederajat, tidak ada perbedaan kelas dan kelompok. Egalitarian diartikan sebagai orang yang percaya, semua orang sederajat.²⁰ Masyarakat egaliter atau masyarakat yang mengemban nilai egalitarianisme dapat digambarkan sebagai masyarakat yang mengakui adanya kesetaraan dalam posisi di masyarakat dari sisi hak dan kewajibannya tanpa memandang suku, keturunan, ras, agama dan sebagainya. Sikap egalitarian, sikap untuk mengakui adanya persamaan sederajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Sikap dan perilaku masyarakat egalitarian adalah masyarakat yang memperjuangkan keadilan, memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat tanpa pandang bulu, untuk maju dan berkembang, menghargai manusia karena prestasi yang dimiliki.

Dalam proses pendidikan madani, dapat mengembangkan sikap egalitarian sehingga peserta didik memiliki sikap empati terhadap orang lain, memiliki kepekaan sosial terhadap sesama manusia, merasa sama dan sederajat dalam hubungan sosial. Mengembangkan pendidikan anti-diskriminatif dan marginalisme, yaitu sikap yang menunjukkan kesamaan hak dan kesempatan dalam aktivitas kehidupan sebagai warga manusia. Membangun sikap anti terhadap subordinansi peran dan tanggung jawab; mengakui adanya potensi yang sama dalam bereksperesi; dan mengakui adanya kesempatan yang sama dalam pelayanan publik.²¹ Membangun sikap peserta didik agar mengutamakan kewajiban daripada hak, dengan ciri menaati aturan, tidak main hakim sendiri, memiliki etos kerja, kritis, kreatif, dan inovatif.

²⁰Nadjib Zuhdi, *Kamus Lengkap Praktis Inggris-Indonesia - Indonesia-Inggris* (Surabaya: Fajar Mulya, 1993), hlm. 160.

²¹Aisyah Amini, Ernie Isis, "Analisis Kebutuhan Pendidikan Multikultural Berbasis Kompetensi pada Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kota Mataram", hlm. 60.

Dari perspektif pengertian tersebut, kiranya pendidikan Islam diharapkan dapat mewujudkan sikap egalitarian dalam proses pembelajaran. Untuk mewujudkan sikap egalitarian dalam proses pembelajaran, peserta didik perlu dikenalkan dengan berbagai sikap kesederajatan yang merupakan sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Indikatornya adalah: (a) persamaan derajat dilihat dari perspektif agama, suku bangsa, gender, golongan; (b) persamaan hak dilihat dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak; dan (c) persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, sebagai individu, dan anggota masyarakat;²² (d) memiliki sikap peduli dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; (e) mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sesama manusia dan sikap menghormati orang lain. Indikator ini dapat dilihat sebagai proses yang dipahami sebagai pengetahuan-*knowledge*, sebagai sikap-*apektif*, dan dapat diampilaksikan-*psikomotorik* dalam kehidupan sehingga menjadi *moral action*.

Pendidikan Madani Menjunjung Tinggi Martabat Manusia

Martabat diartikan sebagai tingkat harkat kemanusiaan, harga diri manusia,²³ menghargai nilai kemanusiaan. Konsep pendidikan madani dapat mewujudkan sikap penghargaan yang tinggi terhadap martabat manusia (*human dignity*), dengan membangun sikap dan perilaku peduli, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban sesama manusia, dan saling menolong. Dalam sistem nilai budaya Indonesia, nilai tolong-menolong mengandung empat konsep, yaitu: manusia di dunia ini tidak sendiri, tetapi dikelilingi oleh masyarakat, komunitasnya, dan alam sekitarnya; secara herarki manusia akan bergantung dengan sesamanya; karena itu, mereka harus berusaha memelihara hubungan baik dengan sesamanya atas dasar sama rata dan sama rasa; dan oleh karena itu, manusia harus sedapat mungkin bersifat komform, guyub, berbuat sama dan bersama

²²*Ibid.*, hlm. 54.

²³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dalam janingan, dalam <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada Sabtu, 31/10/2009, jam. 23.00. WIB.

dengan sesamanya dalam komunitas berasas pada jiwa sama tinggi dan sama rendah,²⁴ dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (martabat manusia).

Konsep pendidikan masyarakat madani diharapkan dapat mengakomodasi nilai tersebut dalam desain kurikulum dan metode pembelajarannya. Indikatornya adalah: (a) mewujudkan nilai kemanusiaan (humanisme) dengan rasa menghargai, mencintai sesama manusia sebagai hamba Tuhan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; (b) mewujudkan sikap dan perilaku yang mengakui kesederajatan, dengan mengakui persamaan derajat dari perspektif suku bangsa, ras, gender, golongan, mengakui persamaan hak, persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, anggota masyarakat dalam pergaulan dan berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki keragaman budaya, etnis, suku bangsa, dan agama, baik bersifat lokal maupun global.

Pendidikan Madani Berbasis Kemajemukan Budaya

Pendidikan madani berbasis kemajemukan budaya, yaitu mengembangkan sikap sebagai perbuatan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan,²⁵ dalam menghargai kemajemukan atau keanekaragaman budaya. Dari perspektif ini kiranya pendidikan Islam dapat didesain untuk mewujudkan sikap dan perilaku peserta didik agar dapat memiliki pendirian dan keyakinan untuk menghargai kemajemukan, keanekaragaman budaya bangsa dalam satu kesatuan “keikaan” di tengah “kebhinnekaan” Indonesia yang merupakan masyarakat multietnik, plural, dan sekaligus sebagai masyarakat multikultural dalam masyarakat madani. Maka, sarana yang paling penting untuk menjadi

²⁴Aisyah Amini, Ernie Isis, “Analisis Kebutuhan Pendidikan Multikultural Berbasis Kompetensi pada Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kota Mataram”, hlm. 60.

²⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dalam jaringan, dalam <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>., diakses pada, Sabtu, 31/10/2009, jam 23.30. WIB.

kekuatan pemersatu bangsa adalah kebudayaan nasional, tetapi kebudayaan nasional Indonesia cukup beragam.²⁶

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Peran pendidikan diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman lebih benar, tentang keragaman budaya, etnis dan agama, demokratis, HAM, pluralitas, toleransi di antara berbagai komunitas menjadi “budaya bangsa Indonesia” merupakan yang urgen.²⁷ Tolstoy berpendapat, sasaran puncak pendidikan ada di luar pendidikan, yaitu “kebudayaan”. Tolstoy beranggapan, nilai masyarakat “beradab” akan tetap bertahan meski

²⁶Keragaman etnis, suku, agama dan budaya atau kebhinnekaan atau multikultural merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan Indonesia pada awal negara ini didirikan oleh *founding fathers* pada masa silam dan lebih-lebih lagi pada masa kini dan di waktu mendatang. Menurut Azyumardi, yang penting dicatat, bahwa keragaman itu hendaklah tidak diinterpretasikan *secara tunggal*. Komitmen untuk mengakui keragaman yang terbungkan dalam budaya bangsa, merupakan salah satu ciri dan karakter utama masyarakat-masyarakat dan negara-bangsa, seperti Indonesia, tetapi hal ini tidaklah berarti ketercerabutan, relativisme kultural, disrupsi sosial, atau konflik berkepanjangan pada setiap komunitas, masyarakat, dan kelompok etnis dan rasial, bukan akibat dari keragaman tersebut. Azyumardi mengatakan bahwa pada saat yang sama juga sesungguhnya terdapat simbol-simbol, nilai-nilai, struktur-struktur, dan lembaga-lembaga dalam kehidupan bersama yang mengikat berbagai keragaman tadi. Dengan kata lain mereka menekankan pada kehidupan bersama, saling mendukung dan menghormati satu sama lain dalam berbagai hak dan kewajiban personal maupun komunal, dan lebih jauh lagi masyarakat nasional. Maka, komitmen terhadap nilai-nilai tidak dapat dipandang berkaitan hanya dengan eksklusivisme personal dan sosial saja, atau dengan superioritas kultural, tetapi lebih jauh lagi dengan kemanusiaan (*humanness*), komitmen dan kohesi kemanusiaan termasuk di dalamnya melalui toleransi, saling menghormati hak-hak personal dan komunal. Manusia, ketika berhadapan dengan simbol-simbol, doktrin-doktrin, prinsip-prinsip, dan pola tingkah laku, sesungguhnya mengungkapkan dan sekaligus mengidealisasikan komitmen kepada kemanusiaan—baik secara personal maupun komunal—dan kebudayaan yang dihasilkannya. Azyumardi Azra, “Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia”, dalam <http://kongres.budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azyumardi%20azra.htm>, diakses pada Selasa, 24 Mei 2005, jam 11.00 WIB.

²⁷H. A. R, Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Magelang: Indonesia Tera, 2002), hlm. 184.

dihujani aneka ragam konflik atau ajang klaim-klaim yang saling bertentangan. Usaha peradaban bangsa Indonesia sejak dulu telah dimulai dari pendidikan, seperti dilakukan ketiga tokoh pendiri pendidikan, yaitu dengan memakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan, kemudian menjadi bahasa Indonesia dan menjadi bahasa persatuan. Ini peradaban tinggi yang tidak dimiliki bangsa. Maka, melalui pendidikan, peradaban bangsa dapat dibentuk, jika pendidikan dapat dianggap sebagai wujud dari reformasi budaya bangsa, wujud-wujud itu adalah bagaimana cara kita menanamkan nilai budaya etnik daerah di kelas tanpa ada pergesekan antaretnik.²⁸

Pendidikan Madani Berbasis Wawasan Global

Wawasan diartikan dengan pemahaman (*insight*), sedangkan globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia²⁹ atau mendunia. Pendidikan berwawasan global adalah konsep pendidikan yang memiliki “pemahaman” (*insight*) yang mendunia. Dari perspektif pengertian ini, proses pendidikan Islam diharapkan dapat mengembangkan manusia dan masyarakat berwawasan global. Sebab, era sekarang ini manusia sedang dihadapkan dan telah memasuki kehidupan era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan pasar bebas, sehingga menuntut berbagai perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Pendidikan Islam diharapkan mampu menciptakan dan mengembangkan sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan yang siap memasuki dan mampu berkompetisi di era global tersebut, atukah pendidikan Islam tetap dengan paradigma lama dan bertahan di tempat.

Ciri dari kehidupan global adalah memberikan peluang, pilihan-pilihan, dan kesempatan-kesempatan baru, tetapi juga merupakan tantangan-tantangan yang semakin sulit dan kompleks, sehingga membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan unggul. Masalahnya sekarang adalah bagaimana orang lokal dan nasional

²⁸Paulo Freire, Ivan Illich, Erich Fromm, dkk., *Mengugat Pendidikan Fundamental Konservatif Liberal Anarkis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 491.

²⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dalam jaringan, dalam <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>., diakses pada, Sabtu, 31/10/2009, jam 24.30 WIB.

mampu menjadi warga global, tanpa tercerabut dari akarnya atau tanpa kehilangan jati dirinya, tapi tidak juga kemudian mengambil sikap untuk menutup diri atau anti global. Bila pendidikan Islam mengambil sikap “menutup diri atau bersikap eksklusif akan kehilangan zaman, tetapi bila membuka diri akan beresiko kehilangan jati diri atau kepribadian”.³⁰ Memang cukup dilematis, tetapi pendidikan Islam mau tidak mau harus ikut bermain dalam irama era tersebut, bila tidak akan kehilangan zaman. Sebab, pada zaman modern ini, tidak ada sesuatu yang tetap, kecuali perubahan itu sendiri. Konsekuensi logisnya, pendidikan Islam dapat mengikuti irama pola perubahan tersebut. Masalahnya, mampukah pendidikan Islam dapat menyambut dan bermain dengan perubahan tersebut sebagai konsekuensi dan peraturan yang tidak terhindarkan, tanpa diatur atau didikte oleh perubahan tersebut.³¹

Dari perspektif tersebut, kiranya proses pendidikan Islam tidak hanya mengembangkan pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan bahasa saja, tetapi juga harus menyiapkan peserta didik dengan keterampilan kemampuan memilih dan keterampilan memecahkan persoalan, sehingga peserta didik siap menghadapi dan memecahkan persoalan yang muncul akibat dari gelombang globalisasi tersebut.

Selain kedelapan aspek tersebut, menurut penulis ada dua aspek yang perlu dikembangkan dalam kurikulum pendidikan Islam untuk menuju pembentukan masyarakat madani Indonesia, yaitu pendidikan “anti kekerasan”; dan pendidikan “anti-korupsi”. Kedua persoalan ini selalu menjadi fenomena menarik dalam realitas masyarakat Indonesia. Bila diperhatikan, kekerasan dalam dunia pendidikan sudah menjadi tontonan menarik di media massa, sehingga warna pendidikan di Indonesia menjadi “buram”. Tindakan korupsi juga menjadi fenomena menarik pula dan manusia Indonesia dinilai kehilangan kejujuran, tidak amanah (*trust*), dan tidak dapat dipercaya. Dari realitas ini, diperlukan disain kurikulum pendidikan Islam yang dapat mengakomodari kedua

³⁰Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21* (Yogyakarta: Safiria Insania Press dan MSI, 2003) hlm. 126.

³¹Periksa lebih lanjut Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, hlm. 11.

persoalan tersebut, sehingga akan melahirkan sikap manusia demokratis, berbudaya, amanah (*trust*), jujur, memiliki sikap lembut, menghormati orang lain, memiliki rasa kesetiakawanan, dan rasa persaudaraan, sebagai ciri atau karakteristik masyarakat madani demokrasi dan beradab. Kedua persoalan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pendidikan Madani Berbasis Anti Kekerasan

Pendidikan merupakan proses di mana bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupannya. Pendidikan adalah proses menaburkan benih-benih budaya, peradaban manusia yang hidup dan dihidupi oleh nilai atau visi yang berkembang dan dikembangkan di dalam masyarakat. Inilah pendidikan sebagai proses pembudayaan.³² Ini berarti, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tetapi sayangnya, dunia pendidikan kita masih saja “dinodai” dengan terjadinya aksi kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun bersifat verbal, yang dapat dilakukan oleh pihak guru dan pimpinan, staf sekolah, PT kepada pelajar/mahasiswa³³ dan antar sesama pelajar/mahasiswa, baik perorangan maupun dalam bentuk kelompok.

Untuk melaksanakan pendidikan tanpa kekerasan diperlukan penanaman nilai, perilaku pra-sosial, mendisiplinkan peserta didik dengan cara positif, mengajari cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, diikuti dengan pedoman yang jelas dan mengikat bagi guru dan peserta didik, serta pengawasan kooperatif dari komunitas sekolah, orangtua, dan tokoh masyarakat. Hal ini semestinya sudah harus dilakukan agar dapat mengatasi tindak kekerasan, seperti tawuran antar-

³²H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 9.

³³Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi: Kasus dan Konsep* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 31.

pelajar dan tindak kejahatan serta kekerasan³⁴ lain yang sering terjadi di sekolah dan luar sekolah.

Pertanyaannya, dari mana harus dimulai untuk meredam perilaku kekerasan yang telah membudaya atau menjadi *culture* di negeri ini? Menurut penulis dimulai dari tiga lingkungan (*tripusat*) pendidikan, yaitu dari lingkungan rumah atau keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketigaya harus memiliki hubungan interalasi dalam upaya meredam kekerasan.

Pendidikan Madani Berbasis Anti Korupsi

Pendidikan pada umumnya membangun dan mengembangkan pengetahuan, nilai moral, sikap, karakter, dan keterampilan generasi bangsa. Pendidikan merupakan proses budaya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Konsep pendidikan Islam sendiri penuh dengan muatan ranah spritual-religius, nilai moral yang kuat, memiliki peluang yang sangat strategis untuk mewujudkan pendidikan anti-korupsi. Katakan saja, proses pendidikan Islam adalah sebagai upaya penyesuaian individu secara terus-menerus dengan pengetahuan, sikap-karakter, nilai etik-relegius, amanah, kejujuran, budaya, keterampilan, dan cita-cita masyarakat. Ini berarti, pendidikan memiliki peran dan peluang yang sangat strategis dalam upaya membangun manusia berkeadaban, dengan memiliki sikap, karakter, amanah, jujur, budaya malu, sebagai sarana membangun sikap anti-korupsi.

³⁴Bila dilihat dari sering terjadi perilaku kekerasan, ada beberapa indikator model kekerasan, yaitu: *Pertama*, “*kekerasan terbuka*”, kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dapat dilihat dan diamati secara langsung, seperti perkelahian, tawuran, bentrokan massa, dan yang berkaitan dengan tindakan fisik lainnya. *Kedua*, “*kekerasan tertutup*”, kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara tersembunyi, seperti mengancam dan intimidasi. *Ketiga*, “*kekerasan agresif*”, kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan mendapatkan sesuatu, seperti perampokan, pemerkosaan, dll. Ketiga indikator model kekerasan di atas selalu menjadi langganan dalam dunia pendidikan kita saat ini. Kekerasan tidak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tak dapat dihindari, di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindakan yang sifatnya destruktif.

Untuk mewujudkan pendidikan anti-korupsi, harus menjadi tanggung jawab bersama antara dunia pendidikan (sekolah), keluarga, masyarakat, dan pemerintah, karena pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan *tri pusat* pendidikan tersebut.³⁵ Sasaran yang ingin dicapai adalah pembentukan aspek kognitif (intelektual), afektif (sikap mental atau moral), dan psikomotorik (*skills-keterampilan*). Secara idealnya, pembentukan aspek kognitif menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik (guru) di sekolah, pembentukan aspek efektif menjadi tugas dan tanggung jawab orangtua, dengan membangun kepribadian dan kebiasaan.³⁶ Pembentukan aspek psikomotorik menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat (lembaga kursus, dan sejenisnya). Dengan pembagian tugas seperti ini, masalah pendidikan anti korupsi menjadi tanggung jawab semua pihak, yaitu orangtua, pendidik (guru), dan masyarakat.³⁷

³⁵Pendidikan kita terdiri atas tiga bagian, yaitu pendidikan informal (keluarga), formal (sekolah) dan nonformal (masyarakat), saling melengkapi dan memperkaya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2003, Pasal 13 Ayat (2), hlm. 13.

³⁶Dalam pendidikan keluarga, mengupayakan pendidikan moral seperti agama, budi pekerti, etika, dan sejenisnya, menjadi tugas dan tanggung jawab orangtua. Ayah ataupun ibu harus melatih anak-anaknya untuk jujur dalam melakukan berbagai hal, khususnya yang menyangkut dengan uang. Kejujuran merupakan prinsip dasar dalam pendidikan anti korupsi. Katakan saja, kalau seorang ayah atau ibu menyuruh anaknya untuk belanja sesuatu ke warung, dia harus diajarkan mengembalikan uang sisa belanja tersebut dan tidak boleh mengantongi uang sisa belanja tersebut untuk dirinya sendiri. Intinya, kita sebagai orangtua harus menanamkan kejujuran pada anak. Hal ini dikatakan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) Meutia Hatta kepada wartawan di sela-sela bakti sosial menyambut Hari Ibu ke-80, di Jakarta. Stevani Elisabeth, "Pendidikan Antikorupsi Dimulai dari Rumah Tangga", dalam <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0812/12/kesra01.html>, diakses pada 30/1/2009, jam 23.00 WIB.

³⁷Made Wiryana, "Penyelesaian Problem Sosial Melalui Optimalisasi Fungsi Tri Pusat Pendidikan" dalam <http://wiryana-holistic.blogspot.com/2008/05/problem-sosial-dan-tri-pusat-pendidikan.html>, diakses pada Sabtu, 31/1/2009, jam 16.45.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung dan bahkan mempercepat pembentukan masyarakat berkeadaban.³⁸ Dengan demikian, proses pendidikan di sekolah perlu diorientasikan pada tataran moral *action-psikomotor*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) memahami-memiliki saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*) dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai dalam kehidupan sehari-hari atau “menjadi”. Lickona (1991) berpendapat untuk mendidik moral anak sampai pada moral *action-psikomotor* diperlukan tiga proses pembinaan berkelanjutan, mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action* dan harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang.³⁹

Dengan pendidikan anti korupsi, diharapkan dapat menghasilkan manusia-manusia yang memiliki kecintaan terhadap bangsa dan negara, memiliki perilaku yang baik, bermoral, berakhlakul karimah, memiliki keimanan yang kuat. Sejak dini para murid mulai diperkenalkan dan mempelajari “betapa buruknya dunia perkorupsian di Indonesia” dalam mata pelajaran Anti-Korupsi. Desain kurikulum mata pelajaran anti korupsi, para murid dapat membahas tentang bahaya korupsi, isu-isu terkini seputar korupsi, siapa saja pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi, siapa saja yang sudah diputuskan bersalah. Target yang diharapkan, dari konsep pendidikan anti korupsi adalah bagaimana menanamkan pola pikir dan sikap kepada masyarakat Indonesia, terutama para pelajar sebagai calon-calon pemimpin untuk mengharamkan dan bahkan pada sikap “membenci” perbuatan atau perilaku yang dinamakan dengan tindakan korupsi.⁴⁰

Implikasi yang diharapkan dari pendidikan Islam untuk menuju terbentuknya masyarakat madani Indonesia adalah sebagai berikut.

³⁸Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, hlm. xix.

³⁹Thomas Lickona, *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1991), hlm. 53.

⁴⁰Periksa lebih lanjut An. Bayu, “Pendidikan Anti Korupsi? Wajib itu”, dalam <http://bayuadhitya.wordpress.com/2008/05/28/pendidikan-anti-korupsi-wajib-itu/>, diakses pada Kamis, 29/1/2009, jam 23.30 WIB.

Pertama, perubahan paradigma, yaitu eksistensi pendidikan Islam, mampu berkomunikasi-berdialog dengan dunia luar *outward looking*, bukan hanya *inward looking*, agar mampu berkompetisi dengan berbagai lembaga pendidikan lainnya, dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya (*insan kamil*) menuju terbentuknya masyarakat madani Indonesia demokratis berkeadaban. Pendidikan yang dikembangkan dengan menggunakan prinsip integral, terpadu, profesional, berorientasi pada nilai etika-religius-*Ilāhiyyah*, kemanusiaan (*insāniyyah*), lingkungan-kealaman (*alāmiyyah*). Ini berarti pendidikan Islam diharapkan dapat: (a) mengembangkan manusia Indonesia yang berkualitas, bertakwa, memiliki iman, akhlak-moral anggun, jujur, amanah, tepercaya, dapat dipercaya. Ini berarti, proses pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek *ortodoksi*, yaitu dominasi aspek kognitif dalam pembelajar, tetapi lebih menekankan pada aspek *ortopraxis*, yaitu bagaimana mewujudkan iman *Ilāhiyyah* dalam tindakan nyata secara operasional; (b) mengembangkan manusia Indonesia yang memiliki sikap demokratis, taat hukum, humanis, menghargai hak asasi manusia, menghargai perbedaan, dan pluralisme; (c) mengembangkan manusia Indonesia yang memiliki kemampuan, pengetahuan, teknologi, keterampilan, atau kemahiran profesional yang integral didasarkan pada nilai *ilāhiyyah*, memiliki kemampuan memecahkan masalah, siap untuk bersaing secara kompetitif dalam era globalisasi dan informasi menuju masyarakat madani Indonesia.

Kedua, kontribusi pemikiran pembaruan pendidikan Islam untuk masyarakat madani Indonesia adalah: (a) mengembangkan strategi pendidikan yang membumi untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang akan dapat mengatarkar peserta didik pada kebutuhan *duniwiah* dan *ukhrawiah*; (b) mengembangkan pendidikan berwawasan kebebasan, demokrasi, humanis, menyenangkan, mencerdaskan, dan memberdayakan; (c) mengembangkan konsep pendidikan yang menghidupkan kembali tradisi intelektual yang bebas, dialogis, inovatif, dan kreatif. Ibnu Rushdi menyatakan, hikmah, penalaran, dan filsafat adalah sahabat agama (*syariah*) atau saudara susunya: agama dan kebebasan berpikir merupakan dua mata uang logam yang tidak dapat

dipisahkan;⁴¹ (d) mengembangkan pendidikan berorientasi pada kebebasan berpikir, karena mutlak diperlukan untuk melahirkan intelektual-intelektual ulama yang memiliki pandangan keagamaan yang baru, segar, dan jernih. Kita banyak berharap, agar desain pendidikan Islam pada era kekinian dapat menjadi era berembusnya kebebasan berpikir, mendorong lahirnya pemikir keagamaan yang memiliki kemampuan bersaing, kritis, transformatif, inovatif, dan konstruktif dalam menghadapi perubahan era globalisasi menuju terbentuknya masyarakat madani Indonesia.

Ketiga, mengembangkan konsep pendidikan yang berorientasi pada kompetensi nilai Ilahiah, *knowledge*, *skill*, *ability*, dan sosial-kultural. Pendidikan berfungsi untuk memberikan kaitan secara operasional pengamalan ajaran dan nilai Islam dalam kehidupan masyarakatnya, lingkungan sosial-kulturalnya secara nyata. Ini berarti upaya perubahan konsep dan praktik pendidikan berbasis nilai Islam jangan hanya bersifat “tambal sulam” yang didasarkan pada kebutuhan dan keinginan yang bersifat sesaat dan sementara, tetapi harus merupakan upaya strategis, terencana, menyeluruh, dapat mewujudkan peningkatan kualitas iman, pengetahuan, dan keterampilan yang aplikatif. Konsep dan praktik pendidikan berbasis pada nilai Islam diharapkan sebagai jawaban atas upaya pengintegrasian nilai dan prinsip Islam dalam kurikulum pendidikan (untuk semua mata pelajaran yang diajarkan) di institusi pendidikan, baik pelajaran keagamaan maupun pelajaran non-keagamaan.

Keempat, mengembangkan konsep pendidikan yang seimbang antara imtak dan iptek, pendidikan dikonsepsikan sebagai aktualisasi nilai ketuhanan pada manusia dan disusun sebagai proses sepanjang hayat, meliputi pengalaman-pengalaman yang berguna dari berbagai sumber, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, di dalam dan di luar sekolah yang akan menjadikan peserta didik dapat memikul tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah, dirinya sendiri, sesama manusia,

⁴¹Zuhairini Miswari, “Islam dan Kebebasan Berpikir”, dalam <http://www.polarhome.com/pipermail/karawang/2003-January/000318.html>, diakses pada 14 Oktober 2003.

dan lingkungannya. Pendidikan harus bertujuan membentuk kepribadian seimbang di kalangan peserta didik melalui latihan rohani (spiritual), intelektual, emosional, dan jasmani dengan menunjukkan peserta didik kepada berbagai pengalaman pada aspek pertumbuhan dan perkembangan. Kurikulum harus berdasarkan pada klasifikasi ilmu pengetahuan, yakni ilmu wahyu (Al-Qur'an) dan ilmu yang diperoleh melalui akal dari ayat-ayat kauniyah (alam jagat raya beserta seluruh isinya).⁴²

Kelima, pendidikan Islam diorientasikan untuk memahami, mengembangkan, dan melaksanakan prinsip; (a) menghargai kebebasan beragama; (b) persaudaraan beragama; (c) persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama; (d) saling membantu, (e) kesederajatan, karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat; (f) mengembangkan prinsip persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara; (g) persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara; (h) penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu; (i) pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran; (j) kedamaian dan keadilan, dalam arti pelaksanaan prinsip masyarakat madani, tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran; dan (l) mengembangkan prinsip pengakuan hak atas setiap orang.⁴³

Kesimpulan

Pembaruan pendidikan Islam menuju masyarakat madani di Indonesia adalah “pendidikan madani” yang **“memberdayakan-membebasikan”**. Basis pembaruan pendidikan Islam yaitu pendidikan madani berbasis religius, berbasis demokrasi, membangun sikap toleransi, berbasis hukum, membangun sikap egalitarian, menjunjung tinggi

⁴²Diding Nurdin, “Reformasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani”, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=34248>, diakses pada Jumat, 6 Februari 2009, jam 24.00 WIB.

⁴³Periksa lebih lanjut Diding Nurdin, “Reformasi Pendidikan Menuju Masyarakat Madani, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=34248>, diakses pada Jumat, 6 Februari 2009, jam 24.00 WIB.

martabat manusia, berbasis kemajemukan budaya, berbasis wawasan global, berbasis anti kekerasan, dan berbasis anti korupsi.

Juni Erpida Nasution, M.Pd.I; *adalah Dosen STAI Nurul Falah Air Molek.*
Email: Erfida_yuni@yahoo.co.id Hp.085278049346